



KR-Devid Permana

BERKUMPULNYA MOTOR TUA: Ribuan motor tua memeriahkan Djogjantique Day (DAD)#7 yang dibuka Wakil Gubernur DIY Paku Alam X di Jogja Expo Center (JEC), Jumat (4/8/2023). DAD#7 yang diselenggarakan Motor Antique Club Indonesia (MACI) Yogyakarta hingga Sabtu (5/8/2023) mengangkat tema ‘Stasioner’ yang bermakna stabil, imbang, dan tenang, tidak hanya menjadi event istimewa bagi para pencinta motor tua, tapi juga turut mendongkrak sektor UMKM dan pariwisata.

KEMENPANRB PRIORITASKAN GURU DAN NAKES

Tak Ada Pemberhentian Tenaga Non-ASN

JAKARTA (KR) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama DPR dan pemangku kepentingan terkait kini terus mengintensifkan pembahasan penataan tenaga non-ASN yang jumlahnya telah membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia. Berdasarkan UU No. 5/2014 dan PP No. 49/2018, tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per 28 November 2023.

“Arahan Presiden jelas, tidak boleh ada pemberhentian massal. Itu prinsip utama dan pertamanya. Perkiraan kita sebenarnya jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000 per 2022, tetapi begitu di-data ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. Datanya kini sedang diaudit BPKP. Penataan itulah yang kini sedang dibahas bersama DPR. Opsinya diba-

has di RUU ASN, kemudian nanti ada regulasi turunannya,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas di kantor Kementerian Agama, Jumat (4/8).

Anas menegaskan, prinsip kedua adalah tidak boleh ada pengurangan pendapatan non-ASN dari yang diterima saat ini. Sehingga harus ada skema kerja yang lebih tepat dan adil.

“Penataan tenaga non-ASN akan menempatkan prioritas pada pelayanan dasar terkait guru dan tenaga kesehatan. Setiap rekrutmen ASN, guru dan tenaga kesehatan selalu diutamakan. Bahkan, dalam perencanaan kebutuhan ASN 2023-2030, hanya guru dan tenaga kesehatan yang masih diperbolehkan mendapat penambahan formasi secara terus-menerus dalam skema *positive growth*,” jelasnya.

Ditambahkan, dengan rekrutmen ASN tiap tahun, secara bertahap tenaga non-ASN akan masuk menjadi ASN secara selektif. “Misalnya 2023 kita rekrut 572.000 ASN, di mana 80 persennya untuk tenaga non-ASN termasuk Honorer THK-II dan selebihnya pelamar umum. Tahun 2022 rekrut 396.000

PPPK, dimana 90 persennya tenaga non-ASN termasuk Honorer THK-II. Sehingga data 2,3 juta tenaga non-ASN itu perlahan berkurang secara selektif menjadi ASN,” papar Anas.

Sementara Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi kebijakan Kementerian PANRB untuk melakukan reformulasi dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama. Reformulasi adalah bentuk afirmasi untuk keadilan dan penghargaan bagi peserta yang sudah membantu banyak program di Kementerian Agama. Dengan kebijakan reformulasi tersebut, formasi yang belum terisi dapat dioptimalkan.

CARI ALAT BUKTI TAMBAHAN

Bareskrim Geledah Ponpes Al Zaytun

JAKARTA (KR) - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengeledah beberapa wilayah di Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu. Pengegeledahan ini untuk mencari alat bukti tambahan dalam rangka melengkapi berkas perkara.

“Perkembangan hari ini (kemarin) penyidik melaksanakan pengegeledahan di Indramayu. Hal ini untuk melengkapi berkas perkara dan mencari alat bukti lainnya,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro di Mabes Polri, Jumat (4/8).

Pengegeledahan dipimpin Kasubdit I Dittipidum Bareskrim Polri melibatkan tim penyidik dari Bareskrim Polri, Inafis dan di-backup Polda Jabar serta Polres Indramayu.

Brigjen Djuhandhani mengemukakan, polisi mengeledah lokasi tersebut, karena tempat kejadian perkara dugaan tindak pidana penistaan agama terjadi di Ponpes Al Zaytun seperti video yang beredar di tengah masyarakat. Selain pengegeledahan,

penyidik juga melakukan pengecekan kembali tempat kejadian perkara.

Terkait dengan alat bukti yang sudah disita penyidik sebelumnya berupa alat bukti yang diserahkan pelapor seperti video, tangkapan layar dan beberapa foto, termasuk menyita akun yang digunakan Ponpes Al Zaytun untuk mengunggah video.

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah merampungkan analisis terhadap transaksi pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang. PPATK lalu menyerahkan hasil analisisnya kepada polisi.

PPATK memang sempat melakukan pemblokiran terhadap rekening yang diduga dipunyai Panji Gumilang. PPATK tak ingin dana tersebut dialihkan ke tempat lain hingga menyulitkan penegakan hukum. Analisa terkait rekening Al Zaytun dilakukan berbarengan dengan proses pemblokiran itu. “Hasil analisis yang kita lakukan sudah kita sampaikan kepada penyidik,” kata Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah. (Ant)-d

HABISKAN STOK 52 TON BBM

SPBU Mudal Buka Sementara

YOGYA (KR) - Satpol PP DIY mengizinkan SPBU Pertamina Mudal di Jalan Palagan Kalurahan Sariharjo Ngaglik Sleman untuk beroperasi kembali. Keputusan pembukaan sementara tersebut telah disetujui pihak Kraton Yogyakarta selaku pemilik Tanah Kas Desa (TKD). Namun izin pembukaan SPBU tersebut hanya bersifat sementara yaitu dari 4 hingga 6 Agustus karena SPBU perlu menghabiskan stok yang dimiliki. Totalnya sekitar 52 ton bahan bakar.

“Izin pembukaan ini sifatnya hanya sementara (tidak bersifat permanen). Semua itu sudah kami koordinasikan termasuk dengan pihak kasultanan selaku pemilik lahan, karena masih ada stok 52 ton. Karena ini pelayanan umum, diputuskan untuk diberi kesempatan,” kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad di Yogyakarta, Jumat (4/8). Seperti diketahui, Satpol PP DIY telah menyegel SPBU Mudal pada lantaran pihak pengelola belum mengurus izin pemanfaatan tanah kas desa (TKD).

Noviar mengatakan, SPBU Mudal sudah beroperasi selama 20 tahun dan perizinannya berakhir pada tahun 2021. Namun, pihak pengelola tidak melakukan perpanjangan izin. Sehingga untuk diputuskan dilakukan penyegekan. (Ria)-d

BENTUK GENERASI EMAS, TANAMKAN NILAI LUHUR

Bakesbangpol DIY Gelar Sinau Pancasila-Wawasan Kebangsaan

WONOSARI (KR) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DIY menyelenggarakan Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kantor Kapanewon Ngawen, Gunungkidul, Jumat (4/8). Melalui program ini untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, termasuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan. “Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini merupakan implementasi Perda DIY No 1 Tahun 2022. Menjadi penting karena Pancasila merupakan pemersatu bangsa. Sehingga masyarakat, termasuk generasi muda perlu untuk ditanamkan nilai-nilai luhur Pancasila,” kata Perwakilan Bakesbangpol DIY Embay Baitiyah.

Dalam acara ini menghadirkan sejumlah narasumber meliputi Komisi A DPRD DIY Heri Dwi Haryono SH, Krisni Noor Patrianti UKDW Yogyakarta, Ir Bambang Wicaksono MY Kampus Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta dan Wahyu Bintari MPSI, serta diikuti pelajar SMA/SMK di Kapanewon Ngawen. Prosesi acara dimulai dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Pembacaan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. “Melalui sosialisasi dan diskusi diharapkan mampu membentuk generasi emas. Tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, namun diperkuat dengan akhlak berdasarkan Pancasila,” ujarnya.

Diungkapkan, dewasa ini terjadi muncul konflik di tengah masyarakat. Termasuk di dalamnya dalam menyambut pesta demokrasi pemilu 2024 mendatang. Sehingga dikuatkannya Pancasila maupun Wawasan kebangsaan dimaksudkan untuk mencegah adanya perpecahan di tengah masyarakat. Karena melalui pengamalan Pancasila dan wawasan kebangsaan, masyarakat diharapkan untuk hidup saling menghormati di tengah banyaknya perbedaan. “Pancasila mampu untuk menjadi pemersatu masyarakat, bangsa dan negara,” jelasnya.

Komis A DPRD DIY Heri Dwi Haryono menuturkan, Pancasila harus terus dibumikan kepada seluruh stakeholder DIY. Targetnya mampu untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada seluruh masyarakat Yogyakarta. Masyarakat DIY memiliki sejarah Panjang dalam terbentuknya Indonesia. Sekarang ini sudah muncul persoalan seperti intoleran, radikalisme, terorisme di DIY, hal

tersebut harus segera dihentikan. “Untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, sejuk dan mengatasi persoalan di masyarakat yakni dengan memperkuat Pancasila,” ucapnya.

Pancasila lanjut Heri Dwi, harus diberikan manusia sejak lahir. Artinya yakni penanaman rasa kasih sayang, rajin beribadah, menghargai ketika diajarkan sejak lahir tentu akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Penanaman nilai Pancasila ini harus menyasar seluruh usia masyarakat di wilayah DIY. Sehingga melalui program Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini akan mampu untuk membentuk karakter dan budaya sebagai masyarakat DIY. “Pada akhirnya akan mampu membentuk masyarakat yang berakhlak dan berbudi,” imbuhnya.

Ir Bambang Wicaksono MT dalam paparannya menuturkan, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu cara pandang Bangsa Indonesia. Mengenai diri, bangsa, tanah air yang terdiri dari masyarakat, suku bangsa, agama, adat istiadat, yang beragam sebagai suatu kesatuan di dalam negara kepulauan dalam berbagai aspek kehidupan. “Kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda adalah perjuangan untuk meletakkan nilai-nilai dasar persatuan bangsa serta Kesatuan Wilayah Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan NKRI adalah komitmen dasar tentang pentingnya kemerdekaan dan demokrasi serta hak asasi dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta hubungan antar bangsa,” ucapnya.

Sedangkan, lanjutnya Konsep Bela Negara secara fisik dengan

mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Secara non fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme. Yakni kesadaran berbangsa dan bernegara. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

Krisni Noor Patrianti UKDW Yogyakarta menyatakan, fungsi pokok Pancasila yakni sebagai pandangan hidup yang bersifat praktis dan sebagai dasar filsafat negara. Pancasila sebagai pandangan hidup yakni nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia dan bersifat fleksibel. “Sedangkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah nilai yang terkandung dalam sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang ada di Indonesia,” jelasnya.

Sementara Psikolog Dosen Psikologi Konselor Praktisi SDM Wahyu Bintari MPSI menuturkan, keluarga perlu menjadi peran dalam memberikan keteladanan, membiasakan seluruh keluarga untuk cinta budaya dan produk negeri. Selain itu memastikan anak tumbuh di lingkungan yang baik, serta mengajarkan budaya bangsa dan cinta terhadap tanah air sejak dini. “Institusi Pendidikan juga memiliki peran menanamkan jiwa nasionalisme dan menghargai jasa pahlawan, dengan mengadakan upacara bendera. Menyanyikan lagu nasional dan mengajarkan Pendidikan agama dan budi pekerti secara nyata,” ujarnya. (Ded)



Embay Baitiyah ketika membuka Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

KR-DEDI EW



Sinau pancasila sekaligus pembagian bendera bagi peserta

KR-DEDI EW



Perwakilan peserta menyanyikan Lagu Nasional

KR-DEDI EW



Krisni Noor Patrianti memaparkan materi Pancasila

KR-DEDI EW